



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2019**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hendaknya sehingga pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah sebagai gambaran perencanaan pembangunan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan yang terdiri dari budidaya perikanan, perikanan tangkap dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.

Ucapan terima kasih tak lupa kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu atau terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai ini baik langsung maupun tidak langsung sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini tidak mengalami hambatan.

Harapan Kami semoga Rencana Kerja Tahun 2020 ini dapat menjadi acuan dan manfaat dimasa mendatang, Amin.

Billahitaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Luwuk, September 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI

DrS. BENYAMIN PONGDATU, M.Si
NIP. 19670604 199303 1 016



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	10
2.3.1 Kekuatan (Strengths).....	11
2.3.2 Kelemahan (Weakness)	11
2.3.3 Peluang (Opportunities)	11
2.3.4 Tantangan (Threats)	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. ..	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	19
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	28



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Perikanan dijabarkan dalam bentuk serangkaian upaya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dengan meningkatkan produksi dan produktifitas guna mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi serta cara untuk mencapai sasaran yang diinginkan, selain untuk memenuhi kebutuhan dinamika strategis yang sangat cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Perencanaan bukanlah sesuatu yang statis akan tetapi lebih bersifat dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga merupakan suatu siklus berkelanjutan yang akan mendasari semua organisasi utamanya dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder).

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) 2020.

Rencana Renja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai ini merupakan satu dokumen yang akan mengarahkan pelayanan di bidang perikanan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan serta akan menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu: (1) kemana pelayanan Dinas Perikanan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai di tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah :



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam kurun satu tahun.
2. Untuk menjaga konsistensi perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sehingga pembangunan dapat mengarah pada visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah :



1. Terencananya pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan tahapan yang jelas dan transparan.
2. Terencananya sistem manajemen pembangunan dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
3. Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan selama satu tahun yang mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dan proses Penyusunan Renja-SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2020 didasarkan kepada Rencana Strategis lima tahunan, yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan Kementerian/Lembaga/Provinsi dan memperhatikan kebutuhan setempat. Dari beberapa sasaran strategis, ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas dan disusun Rencana Kerja sebagai Dasar Penyelenggaraan Revitalisasi Kegiatan Pengembangan Kemaritiman berdasarkan potensi wilayah di Kabupaten Banggai adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Rencana Kerja (Renja), fungsi Renja serta proses penyusunannya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Permendagri, Permentan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dan lainnya yang mengatur struktur Organisasi, Tugas dan fungsi, dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan tahun berjalan (n-1) mengacu kepada APBD tahun berjalan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Mencakup kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dengan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Memuat uraian Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengannya, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan SKPD, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat uraian mengenai proses membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut, dan Lampiran Tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap kebijakan Nasional yakni yang mengarah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait Tupoksi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Didasarkan kepada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

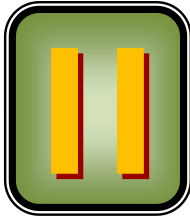
3.3 Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan.



BAB IV. PENUTUP

Berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2020 secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan yang meliputi para Pelaku Utama/Pelaku Usaha sektor Perikanan dalam melaksanakan Revitalisasi di bidang perikanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Untuk mencapai tujuan dimaksud dan dengan didukung oleh dana APBD Kabupaten, dana APBD Provinsi dan dana APBN, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai melaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan skala prioritas. Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada kegiatan pokok prioritas dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai dan arah kebijakan pembangunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja Sumber daya Kelautan dan Perikanan serta unit-unit organisasi baik Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan juga penyuluh perikanan di lapangan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa kebersihan Kantor.
- d. Penyediaan alat tulis kantor.
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan makanan dan minuman.
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- j. Penyediaan jasa administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - b. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
- 6. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan**
 - a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
 - b. Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)
- 7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**
 - a. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
 - b. Pembinaan dan pengembangan perikanan
 - c. Pencetakan kolam ikan air tawar
 - d. Sosialisasi dan pembinaan kelompok budidaya
 - e. Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan
 - f. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih
 - g. Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan
- 8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**
 - a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI
 - c. Sosialisasi dan pembinaan perikanan tangkap
- 9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**
 - a. Promosi dan pameran
 - b. Koordinasi program pengembangan usaha, dan pemasaran hasil perikanan.
 - c. Pelatihan pengolahan hasil perikanan
 - d. Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan



- e. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan
- f. Pengadaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin
- g. Sosialisasi dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan

10. Program pengembangan sumber daya kelautan

- a. Survey sumber daya perikanan

11. Program pengolahan data statistik

- a. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dilihat dari segi geografis Kabupaten Banggai merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai banyak potensi sumber daya alam seperti, potensi pertambangan, potensi industri, potensi wisata, potensi agriculture, potensi perikanan dan kelautan, dan potensi pertanian dan perkebunan. Namun berdasarkan hasil pendataan dan pengamatan, investor belum tertarik untuk menanamkan investasi pada sektor - sektor unggulan lainnya, saat ini hanya pada sektor pertambangan yang menjadi keunggulan investasi, hal ini tercermin dari perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Banggai dimana pada sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten Banggai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.

- a. Tugas Pokok : Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kelautan dan Perikanan.
 - b. Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.



- c. Pembinaan dan pengendalian pelayan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- d. Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan fungsinya, struktur organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas membawahi :
 - a. Sekretaris membawahi :
 - Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset.
 - Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi :
 - Kepala Seksi Pelayan Usaha Perikanan
 - Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
 - Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
 - Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
 - Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
 - Kepala Seksi Sumber Daya Ikan
 - d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 - Kepala Seksi Pengembangan Budidaya
 - Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam upaya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, perlu dilakukan analisis terhadap peluang dan tantangan pengembangan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).



2.3.1 Kekuatan (Strengths)

1. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banggai;
2. Adanya Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Banggai;
3. Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yang mendukung pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan.

2.3.2 Kelemahan (Weakness)

1. Kurangnya data dan informasi potensi sumber daya alam di Kabupaten Banggai;
2. Keterbatasan petugas teknis/penyuluh perikanan lapangan baik dalam jumlah maupun kualifikasi;
3. Kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yang masih rendah;
4. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait;
5. Kurangnya dukungan dana untuk pengembangan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.

2.3.3 Peluang (Opportunities)

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting;
2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlunya didukung munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar;
3. Peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan;
4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perikanan dan kelautan.



2.3.4 Tantangan (Threats)

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan dan alat penangkap ikan terlarang;
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun;
3. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya;
4. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung persyaratan mutu produk olahan hasil perikanan dimana masih banyak penggunaan formalin atau bahan tambahan terlarang lainnya yang digunakan sebagai bahan pengawet produk perikanan.
5. Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusakkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.



Tabel 1. Analisis SWOT

INTERNAL	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sumber daya alam serta potensi pariwisata yang potensial; 2. Adanya investasi berskala nasional ; 3. Visi dan Misi Kabupaten Banggai yang mendukung pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya data dan informasi potensi sumber daya alam di Kabupaten Banggai; 2. Keterbatasan petugas teknis / penyuluh perikanan lapangan baik dalam jumlah maupun kualifikasi; 3. Kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yang masih rendah; 4. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait; 5. Kurangnya dukungan dana; 6. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana
	OPPORTUNITY (O)	STRATEGI (SO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan; 2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 3. Peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan 4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 	Mendayagunakan potensi dan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan usaha perikanan secara cepat dan tepat	Meningkatkan kemampuan teknis dan menambah jumlah petugas teknis / penyuluh perikanan lapangan dan kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan guna percepatan pembangunan perikanan
THREATS (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat akan pelestarian sumber daya alam masih perlu ditingkatkan 2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan 3. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan 4. Mutu produk pengolahan hasil perikanan masih rendah. 5. Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan dan sepanjang pesisir pantai dan di lautan menimbulkan berbagai kerusakan 	Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan, pelestarian dan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya saing produk	Mengoptimalkan SDM aparatur dan sarana prasarana yang tersedia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang ada



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Banggai yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai potensi di sektor kelautan dan perikanan dengan wilayah laut ± 20.309,68 Km², berada di Zona II Teluk Tomini dan Zona III Teluk Tolo. Panjang garis pantai Kabupaten Banggai ± 613,25 Km. Potensi Lestari perikanan laut yang dimiliki yaitu ± 48.621,1 ton pertahun yang terdiri atas ikan pelagis ± 39.387,9 ton/tahun dan ikan Domersal ± 9.239,2 ton/tahun. Kabupaten Banggai juga memiliki Areal Pertambakan yaitu seluas ± 8.825 Ha, jenis yang dibudidayakan yaitu udang windu (ekspor USA, Uni Eropa dan Asia), Vannamei dan Ikan Bandeng. Sedangkan untuk areal Kolam Air tawar seluas ± 260 Ha untuk budidaya ikan mas dan ikan nila. Untuk Budidaya laut potensi yang ada seluas ± 6.396 Ha, yang baru di dimanfaatkan ± 78.800 m² untuk budidaya rumput laut, ± 44.750 m² budidaya kerapu/keramba apung, ± 430 m² kepiting Bakau, dan ± 30.300 m² budidaya mutiara. Sebagian besar wilayah kabupaten Banggai berada di wilayah pesisir, olehnya itu Desa yang ada di dominasi oleh Desa pesisir sejumlah 131 Desa (Data sebelum pemekaran) dengan 14.067 Rumah Tangga Perikanan. Kabupaten Banggai memiliki 72 buah pulau yang tersebar di beberapa Kecamatan

Melihat potensi tersebut, kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Banggai, untuk itu pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang mampu menekan tingkat kemiskinan serta mendorong pembangunan sektor lain dalam wilayah Kabupaten Banggai. Ini berarti bahwa pembangunan perikanan harus terus menerus meningkatkan perannya demi terwujudnya pembangunan wilayah yang membutuhkan keserasian dan keterpaduan secara holistik dan terintegrasi.

Secara kongkrit, pembangunan Perikanan dijabarkan dalam bentuk serangkaian upaya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dengan meningkatkan produksi dan produktifitas guna mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Kondisi ini menyebabkan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai memiliki tugas yang cukup berat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2016–2021 mempunyai visi **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”**



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi.
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah.
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Adapun beberapa permasalahan pembangunan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor penghambat internal antara lain:

1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan.
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang operasional program dan kegiatan.
4. Masih kurangnya penyuluh perikanan yang mengisi struktur Dinas Perikanan dalam kotak jabatan fungsional.
5. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor penghambat eksternal antara lain:

1. Sebagian besar nelayan, pembudidaya dan pengolah masih bersifat tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha.
2. Sebagian besar struktur armada perikanan yang dimiliki masih didominasi struktur skala kecil dan tradisional.
3. Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek ilegal, unregulated dan unreported fishing.
4. Penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh pengeboman dan pembiusan masih lemah.
5. Terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing.



7. Kebijakan moneter, keberpihakan pihak perbankan dan lembaga perkreditan dalam sistem permodalan terhadap masyarakat pesisir masih rendah.

Beberapa isu strategis yang dapat dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Banggai antara lain:

1. Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang focus pada:
 - a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan;
 - b. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penguatan Pasar Dalam Negeri;
2. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor.
3. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional.
4. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat pada produktifitas yang rendah.
5. Rendahnya akses permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi budidaya ikan.
7. Keterbatasan petugas teknis/penyuluh perikanan lapangan baik dalam jumlah maupun kualifikasi.
8. Belum terlaksananya program pencetakan kolam budidaya ikan.
9. Belum adanya pengenalan teknologi pengolahan ikan bagi nelayan dan petani budidaya ikan.

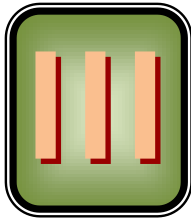
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Umumnya usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat disampaikan pada Musrembang Kecamatan atau pada tingkat Kabupaten. Adapun beberapa usulan prioritas tersebut mencakup:

1. Program pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan seperti:
 - a. Pencetakan kolam ikan air tawar
 - b. Pengembangan bibit ikan unggul
 - c. Pengadaan peralatan perbenihan
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih
 - e. Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan
2. Program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan seperti:
 - a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap seperti pengadaan alat tangkap nelayan serta pengadaan mesin katinting dan perahu
 - b. Sosialisasi dan pembinaan perikanan tangkap



- c. Pengadaan kapal pajala dan perlengkapannya.
 - d. Pengadaan kapal penangkap ikan
 - e. Pengadaan mesin tempel/jonson
 - f. Pengadaan rumpon biasa
 - g. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI
 - h. Pembangunan tambatan kapal
3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan seperti:
- a. Sosialisasi dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin
 - c. Pengadaan peralatan pengolahan



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok nasional sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Pembangunan Nasional

No.	Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Unggulan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1	Kedaulatan Pangan <ul style="list-style-type: none">• Produksi Ikan (juta ton)	12,4	18,8
2	Maritim dan Kelautan <ul style="list-style-type: none">• Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar<ul style="list-style-type: none">○ Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan• Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan<ul style="list-style-type: none">○ Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton)○ Pengembangan Pelabuhan Perikanan○ Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)	52%	87%
		22,4	40-50
		21 unit	24 unit
		15,7	20

Sumber : Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah:

1. Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim.
2. Pemberantasan Perikanan Illegal/ *IUU Fishing*.
3. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan.
4. Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan.
5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan.



Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas Kementerian Kelautan Dan Perikanan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan disusun menjabarkan 3 misi pembangunan, yang pelaksanaannya akan berbasis pada komoditas, ekosistem, dan kewilayahan, yang akan dipercepat dengan peningkatan koordinasi dan sinergi lintas K/L terkait dan penguatan peran Pemerintah Daerah. Arah kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tahun 2015-2020 adalah:

1. Memberantas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.
2. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
4. Mengembangkan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif.
5. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banggai, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016 - 2021 adalah **“Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk Mensejahterahkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan”**.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya produksi hasil perikanan.
- b. Meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan;
- c. Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan; dan
- d. Meningkatnya tata kelola Dinas Perikanan yang baik, bersih dan akuntabel



Indikator kinerja utama Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	(Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tahun Sekarang/Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Target Daerah) x 100	Bidang Perikanan Tangkap
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	(Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sekarang/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Target Daerah) x 100	Bidang Perikanan Budidaya
2.	Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah	(Produksi Perikanan yang Diolah Tahun Sekarang / Produksi Perikanan yang Diolah Target Daerah) x 100	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks total penerimaan nelayan / Indeks total pengeluaran nelayan	Bidang Perikanan Tangkap

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2019	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	90,90 %	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	90,90 %	Program Pengembangan Budidaya Perikanan



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2019	PROGRAM
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah	90,91 %	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	Penanggung Jawab Program: Sekretariat
		Persentase Peningkatan Disiplin ASN	90 %	

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai di dukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 105 (seratus lima) orang yang terdiri dari:

Tabel 4. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pegawai	Jumlah (Orang)
Pejabat Eselon II	1
Pejabat Eselon III	4
Pejabat Eselon IV	11
Non Eselon	31
Honorar	31
Jumlah	77

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Tahun 2017

Tabel 5. Susunan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (Orang)			
		S2	S1	D3/SLTA	SLTP
1.	IV	2	2	-	-
2.	III	1	22	4	-
3.	II	-	-	15	-
4.	I	-	-	-	1
5.	Honorar	-	14	17	-
Jumlah		3	38	36	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Tahun 2017



Tabel 6. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	IV	4	-
2.	III	16	11
3.	II	8	7
4.	I	1	-
5.	Honorar	23	8
Jumlah		52	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Tahun 2017

Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini di Dinas Perikanan Kabupaten Banggai guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah (unit/set)	Ket.
1	Bangunan Pos Pengawas Perikanan	5	
2	Bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	4	
3	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	
4	Bangunan Balai Benih Ikan (BBI)	2	
5	Bangunan Pabrik Es	4	
6	Coldstorage/mini Freezer	3	
7	Bangunan Pondok Wisata	3	
8	Bangunan Pos Pengawas KKLD	1	
9	Bangunan Sentra Pengolahan Ikan Roa	12	
10	Bangunan Bangsal Pengolahan Filet Tuna	2	
11	Kios Outlet Ikan Roa	1	
12	Mess Petugas Sentra Pengolahan Ikan Roa	1	
13	Slip Way (Docking)	1	
14	Mobil Dinas	4	
15	Mobil Box Freezer	1	
16	Motor Dinas	59	
17	Speed Boat	2	
18	Kulkas	1	
19	Peralatan Selam/Diving	1	



No	Nama Barang	Jumlah (unit/set)	Ket.
20	Sound Sistem	1	
21	Kursi Tamu/Sofa	4	
22	AC	6	
23	Fax	1	
24	Pesawat Telepon	14	
25	Brand kas	1	
26	Proyektor	2	

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program pelayanan perkantoran adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- c. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- h. Rapat-rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah.
- i. Rapat-rapat Kerja Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
- j. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
- f. Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program peningkatan disiplin aparatur adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b. Pengadaan pakaian Korpri
- c. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- d. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
- e. Penyusunan dokumen RKBU Perangkat Daerah

6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan data dan updating data informasi perangkat daerah

7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan Program dan kegiatan
- b. Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)



8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program pengembangan budidaya perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
- b. Pengembangan budidaya rumput laut
- c. Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)
- d. Pencetakan Kolam/Tambak Ikan
- e. Sosialisasi dan pembinaan kelompok budidaya
- f. Pengembangan sarana prasarana balai benih
- g. Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya
- h. Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan
- i. Pengadaan alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya
- j. Pengembangan budidaya ikan bandeng
- k. Rehabilitasi Kolam/Tambak Ikan
- l. Pengolahan Data Statistik Perikanan Budidaya
- m. Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya

9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program pengembangan perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

- a. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
- b. Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan
- c. Fasilitasi kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
- d. Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI
- e. Sosialisasi dan pembinaan perikanan tangkap
- f. Restocking perikanan laut
- g. Pembuatan/pembangunan fish home
- h. Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap
- i. Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan

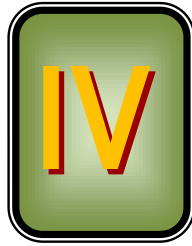
10. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Promosi dan pameran
- b. Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil perikanan
- c. Pelatihan pengolahan Hasil perikanan
- d. Pembuatan Profil Usaha dan Investasi Kelautan dan perikanan
- e. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan
- f. Pengadaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin



- g. Sosialisasi dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan
- h. Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

Program Dinas Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perikanan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).



P E N U T U P

Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2020 adalah sebagai suatu dokumen yang akan dijadikan pedoman, penentuan arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Rencana kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai yang akan dilaksanakan selama tahun 2020.

Pelaksanaan Rencana kerja (Renja) ini menuntut partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perikanan sehingga tercipta keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kemaritiman tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Rencana Kerja (Renja), melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan petani, nelayan, dan masyarakat lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dapat terwujud.